

DPRD LINGGA DIMINTA SELESAIKAN PERMASALAHAN DI RSUD DABOSINGKEP



Batamnews.co.id

Kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)¹ Dabosingkep Kabupaten Lingga Kepulauan Riau kian tidak kondusif, dikarenakan terjadinya keributan di RSUD tersebut yang berawal ketika salah satu mantan pejabat keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)² berinisial Z yang bersama-sama dengan direktur RSUD tersebut datang dan ingin mengambil berkas di ruangan BLUD. Beberapa dokter dan perawat melarang pejabat tersebut masuk. Hal ini yang memicu keributan dan menjadi perhatian banyak orang yang sedang berobat di RSUD dabosingkep.

Dokter Indra Jaya yang kebetulan ada di lokasi mengatakan, teman-temannya melarang salah satu mantan pejabat BLUD tersebut masuk keruangan

¹Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota adalah unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan yang merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bersifat otonom,serta dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 43 dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah).

²Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah).

BLUD untuk mengambil berkas. Alasan mereka, permasalahan ini masih dalam penyelidikan³ pihak Kepolisian⁴, sehingga pengambilan berkas dikuatirkan akan mengganggu penyelidikan. Jika keperluan berkas tersebut memang untuk bahan audit, maka sebaiknya audit itu dilakukan di RSUD langsung. "Jika memang ada audit⁵, kami harap jangan sepihak kami juga dilibatkan," ujarnya. Ia kemudian menanggapi situasi tersebut sebagai reaksi spontan rekan-rekan atas tindakan yang tidak kooperatif dari pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus yang tengah bergulir.

Kasus tersebut adalah dugaan penggelapan⁶ dana jasa pelayanan terhadap karyawan di RSUD Debosingkep. Karyawan mempertanyakan dan menuntut jasa pelayanan tahun 2018 senilai Rp 1,7 miliar lebih yang tidak ada di rekening BLUD RSUD Dabosingkep. Dana jasa pelayanan adalah merupakan uang Jaspel yang bersumber dari kapitasi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)⁷ Kesehatan yang biasanya di beberapa daerah dibayarkan tiga bulan sekali kepada karyawan, pegawai maupun staf di Rumah sakit.

Indra mewakili rekan-rekan karyawan di RSUD merasa telah dirugikan karna hak mereka tidak dibayarkan selama tahun 2018, ia berharap ada perhatian

³Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

⁴Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.(Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

⁵Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

⁶Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah . (Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)).

⁷Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah BPJS yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

dan keseriusan Pemerintah Daerah⁸ dan Kepolisian untuk mengusut kasus ini. Alasannya bukan untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu melainkan didalam jumlah yang besar tersebut terdapat hak-hak orang banyak.

Menurut Indra seharusnya setiap bulan, para tenaga medis yang terdiri dari dokter, bidan, perawat dan tenaga medis lainnya, mendapatkan tunjangan jasa pelayanan dari pelayanannya terhadap pasien yang berasal dari BPJS. Besarnya jasa bervariasi dan tergantung golongan dan jabatan tenaga medis, dan seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari jasa pelayanan. Dikarenakan hal tersebut dokter dan perawat di RSUD Dabosingkep, mengancam akan menghentikan pelayanan umum maupun pasien (BPJS).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)⁹ Provinsi Kepulauan Riau Saptono Mustaqim, mengajak rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lingga tidak hanya berkomentar namun juga harus turun ke RSUD Dabosingkep, hal ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi yang sebenarnya terjadi, agar permasalahan di RSUD tersebut bisa cepat diselesaikan.

"Kalau sudah tidak kondusif, maka wajib kita kondusifkan dan semuanya harus turun membantu menyelesaikan," ungkapnya. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi dari anggota DPRD adalah melakukan pengawasan, untuk itu permasalahan di RSUD Dabosingkep harus segera diselesaikan. Sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. "Pelayanan rakyat kita terhambat, ini perlu segera dicarikan jalan keluarnya," ujarnya.

Rumah sakit merupakan satu-satunya pelayanan sentral yang ada di pulau Singkep dan Kabupaten Lingga, jika para petugas kesehatannya tidak mampu bekerja maksimal maka target Bupati Lingga dibidang kesehatan tidak akan

⁸Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

⁹DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014).

pernah terwujud. Hal ini tentunya juga akan merugikan masyarakat setempat, yang seharusnya mendapat pelayanan kesehatan secara maksimal.

Gelombang protes dari berbagai pihak terus mengalir, namun sayangnya selain berkomentar di media belum ada langkah-langkah, baik dari anggota DPRD maupun pemerintah daerah yang turun meninjau ke RSUD Dabosingkep.

Sumber Berita :

Kepri.antaranews.com, DPRD Lingga Diminta Turun Selesaikan Permasalahan di RSUD, Minggu 3 Maret 2019

<https://kepri.antaranews.com/berita/53981/dprd-lingga-diminta-turun-selesaikan-permasalahan-di-rsud>

Batamnews.co.id, Layanan Kesehatan Terancam akibat Polemik RSUD Dabo, Minggu 3 Maret 2019

<https://www.batamnews.co.id/berita-45411-layanan-kesehatan-terancam-akibat-polemik-rsud-dabo.html>

Detikanambas.com, DPRD Lingga Diminta Selesaikan Permasalahan Di RSUD Dabosingkep, Minggu 3 Maret 2019

<https://www.detikanambas.com/2019/03/03/dprd-lingga-diminta-selesaikan-permasalahan-di-rsud-dabosingkep/>